

PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DALAM PANDANGAN ISLAMAlsar Andri¹ dan Al-Qusairi²

¹Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas-Jake Teluk Kuantan
Email : alsarandri50@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Podomoro, Jl. Sunter Permai Raya, Nomor 1, RT 11/RW 06 Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350
Email : alqusairi1@gmail.com

ABSTRAK

Penempatan pegawai pemerintahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam mencapai tujuan pemerintahan, hal ini terkait dengan pendistribusian kerja ataupun wewenang serta untuk mencapai kinerja yang maksimal dari sebuah organisasi pemerintahan. Penempatan pegawai pemerintahan haruslah memperhatikan keadaan internal maupun eksternal dari sebuah organisasi, agar seseorang yang ditempatkan pada sebuah jabatan atau posisi dapat memberikan kontribusi yang maksimal, ini tidak terlepas dari seorang pegawai harus memiliki kapabilitas yang dimiliki. Islam, adalah sistem yang menyeluruh yang tidak memisahkan antara peribadatan dan pemerintahan banyak mengajarkan tentang tata cara penempatan pegawai yang baik dan benar, baik secara nash Al-Qur'an maupun Al-Hadist.

Kata Kunci : Penempatan Pegawai Pemerintahan.**ABSTRACT**

The placement of government employees is one of the important components in achieving government goals, this is related to the distribution of work or authority and to achieve maximum performance of a government organization. The placement of government employees must pay attention to the internal and external conditions of an organization, so that someone who is placed in a position or position can make a maximum contribution, this cannot be separated from an employee who must have the capability. Islam, which is a comprehensive system that does not separate worship and government, teaches a lot about good and correct procedures for placing employees, both in the texts of the Qur'an and Al-Hadith.

Keywords : Placement of Government Employees.

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi yang memiliki kompleksitas kewenangan, sehingga dalam menjalankan Negara untuk mencapai tujuannya maka secara administrasi kewenangan tersebut harus didistribusikan kepada pemerintahan. Secara pembagiannya pemerintahan di Indonesia dibagi kedalam Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Ketiga pemerintahan inilah yang saling bersinergi baik dalam hal kebijakan maupun permasalahan administrasi, sehingga administrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saling terintegrasi atau yang di sebut dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan Negara yang telah didistribusikan kepada pemerintahan, hendaknya pemerintahan memperhatikan penempatan pegawai ataupun disebut dengan administrasi kepegawain agar menunjang kinerja pemerintahan secara maksimal.

Untuk menyesuaikan diri dengan era globalisasi, pemerintahan Indonesia telah memperbaiki struktur birokrasinya, baik dari segi peningkatan kualitas pegawai pemerintah mampu mengembangkan sistem yang modern dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada warga. Ini adalah tugas penting saat ini, khususnya di Indonesia, sebab Negara ini tengah menghadapi berbagai perkembangan baru, seperti demokratisasi dan desentralisasi. Indonesia memiliki jumlah pegawai negeri sipil yang besar : sekitar 3,74 juta atau 1,7 % seluruh penduduk tahun 2005. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 1974, pada awal era yang disebut Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), yang ada waktu itu sekitar 2,1 % dari jumlah populasi. Persentase ini serupa dengan Negara-negara lain di wilayah ini,

seperti India (1,2 %), Pakisatan (1,5 %), Filipina (2,1 %) dan Vietnam (3,2 %). (Tjiptoherjanto dan Manurung, 2010 : 381-382).

Perubahan yang sangat mendasar dalam organisasi pemerintahan daerah telah berpengaruh terhadap organisasi/kelembagaan pemerintahan daerah. Dampak yang sangat dirasakan bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktural pemerintahan daerah, tetapi dan terutama pada kesiapan dan kesedian sumber daya manusia aparatur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif dan akuntabel. (Umam, 2012 : 353).

Hossein mengemukakan bahwa sumber daya manusia aparatur yang diperlukan adalah memiliki dedikasi dan kemampuan profesional di bidangnya, juga memiliki dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. (dalam Umam, 2012 : 353).

Pada dasarnya Administrasi Kepegawaian Negara (*Public Personal Administration*), merupakan salah satu cabang dari administrasi Negara yang membahas secara khusus mengenai persoalan pegawai Negara dan atau Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS. Nicholas Henry (1988 : 286), mengatakan bahwa Administrasi Kepegawaian Negara adalah pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintahan. Selanjutnya definisi Administrasi Kepegawaian Negara menurut Arifin Abdulrachman (1976 : 13) adalah salah satu cabang dari administrasi Negara yang bersangkutan dengan segala persoalan Pegawai Negara. Michael Armstrong (1987 : 13), mendefinisikan *personal management* atau manajemen

kepegawaian adalah :

Bagaimana memperoleh, mengembangkan dan memberi motivasi kerja kepada pegawai yang diperlukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Bagaimana mengembangkan suatu struktur dan iklim kerja, dan gaya manajemen organisasi agar diperoleh kerja sama dan komitmen dalam organisasi. Bagaimana mempergunakan skill dan kapasitas terbaik dari seluruh pegawai. Bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum dari suatu organisasi kepada pegawainya, terutama dalam kondisi dan kualitas kerja yang diberikan kepada mereka.

Selanjutnya tujuan administrasi kepegawaian menurut Mokhammad Syuhadhak (1996 ; 4), yaitu :

Penggunaan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Menciptakan, mengembangkan suasana kerja dalam kerjasama dan mengusahakan perkembangan yang maksimal bagi masing-masing individu yang bekerjasama.

Oleh karena itulah Manajemen Pegawai Negeri Sipil (MPNS) perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standard dan prosedur yang seragam dan tetap dalam menerapkan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsure dalam manajemen pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Adanya keseragaman tersebut, diharapkan dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pegawai negeri. (Pasolong, 2013 : 151-152).

Administrasi kepegawaian dapat

diartikan bermacam-macam, antara lain adalah sebagai berikut :

Sebagai suatu seni untuk memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa, sehingga diperoleh atau dicapai hasil dan pelayanan yang sebesar-besarnya, baik mengenai mutu maupun mengenai jumlah dari tenaga kerja. Sebagai suatu aturan tentang cara mengorganisasikan dan memperlakukan orang-orang yang bekerja sedemikian rupa, sehingga mereka masing-masing akan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadi memperoleh efisiensi yang maksimal untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya, dan disamping itu juga untuk organisasi, dimana mereka merupakan bagian dalam menentukan kemajuan dan hasil-hasil yang optimal. Sebagai suatu seni untuk memperoleh, mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang cakap sedemikian rupa, sehingga fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan penghematan yang sebesar-besarnya.

Selain dari itu, secara singkat administrasi kepegawaian menurut Moekijat juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

Keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber-sumber manusia dalam organisasi. Segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Segenap aktivitas yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi kepegawaian adalah administrasi yang berhubungan dengan segala persoalan pegawai. Administrasi kepegawaian adalah aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja itu kepadanya secara seimbang. (dalam Syafiie, 2000 :

36-37).

Suatu motto yang paling tepat untuk administrasi kepegawaian adalah “Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat” atau dikenal dengan istilah “*The right man on the right place*”. Dengan begitu seseorang akan ditempatkan sesuai porsinya. Tetapi adakalanya yang berlaku di suatu Negara atau adalah sebaliknya, yang menduduki suatu jabatan bukanlah orang yang mampu. Penempatannya pada suatu jabatan oleh karena pengaruh *pressure group*, atau *spoil system* yaitu pengisian jabatan-jabatan tertentu (formasi) dengan anggota keluarga sendiri dari pejabat yang berwenang mengangkat. Ikatan seperti ini, bila ada dalam suatu organisasi semakin lama semakin sulit diterobos orang lain, agar orang lain tidak ikut memegang peranan, sehingga muncul ikatan primordial. Hal ini apabila dalam suatu organisasi yang besar seperti pemerintahan, terbentuklah tirani dari suatu dinasti, seperti Fir’aun, Marcos, Louis XIV dan Muawiyah bin Abu Sufyan. (Syafiie, 2000 : 36-38).

Islam, yang kita yakini sebagai sebuah ajaran yang *Syamil* (universal) yang mengajarkan segala sendi-sendi kehidupan, merupakan ajaran yang hak, memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia, tidak terlepas hanya semata pengajaran dan petunjuk peribadatan semata (ukhrawi) tetapi meliputi petunjuk dalam menjalankan pemerintahan, sistem politik serta administrasi kepegawain. Islam banyak memberikan petunjuk ataupun pandangan dalam menjalankan pemerintahan terkhusus bagaimana cara penempatan pegawai, agar seseorang dapat berkontribusi dalam kemajuan umat dan kejayaan, sehingga seseorang yang ditempatkan pada sebuah urusan keumatan benar-benar orang yang tepat, inilah salah satu kunci rahasia Muhammad Rasulullah saw mendulang

kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan dan selama 10 (sepuluh) tahun periode pemerintahan beliau di Madinah dapat menaklukkan segenap wilayah di Jazirah Arab, karena beliau memahami konteks penempatan pegawai (pengurus umat) dan kemampuan (*capability*) para sahabat-sahabatnya. Karena itu, petunjuk Islam harus diyakini sebagai petunjuk yang benar adanya dan Islam merupakan ajaran yang kebenarannya bersifat umum tidak hanya sebatas pada golongan tertentu, dan tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu.

ANALISIS KAJIAN

Penempatan Pegawai Dalam Pandangan Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Al-Hadist, Pada Masa Pemerintahan Islam Madinah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Saw.

Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad saw, adalah seorang kepala Negara dan kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau telah mendirikan Negara bersama orang-orang pribumi (Anshar) dan masyarakat pendatang (Muhajirin). Beliau membuat konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, memberi perlindungan (*proteksi*) kepada umat non-Islam, beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar kebulatan tekad Aqabah. Inilah Negara yang jujur tetapi bukan Negara teokrasi karena beliau tidak menganggap dirinya anak Tuhan. Beliau Hamba Allah, pesuruh-Nya dalam menyampaikan risalah kenabian, kehadiran beliau di dunia bagaikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Kendatipun beliau menyuruh manusia memusyawarahkan urusan keduniawian, dalam arti pembentukan parlemen (badan legislative). Namun beliau telah memperlihatkan contoh yang lebih terasa dilihat dalam perilaku para sahabat beliau yang kemudian menjadi pemimpin pemerinthan (khalifah) yang

jujur (*al-rasyidah*). (Syafiie, 2004 : 127).

Pada sisi lain Rasulullah saw, juga memberikan pandangan dalam menempatkan atau memilih seseorang ataupun pegawai untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Rasulullah sangat mempertimbangkan kapasitas pegawai yang ingin ditempatkan dengan memperhatikan sifat kejujuran dari seorang pegawai, hal ini dapat kita lihat dalam berbagai hadist beliau :

Dalam hadist Muslim diberitakan, Ma'qil mendengar Rasulullah bersabda "*Seseorang yang telah ditugaskan oleh Allah memerintah rakyat kalau dia tidak memimpin rakyat dengan jujur niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga*". Selanjutnya Ma'qil juga pernah mendengar Rasulullah bersabda dengan tekstual yang berbeda "*Seorang pembesar apabila mati, sedang dia tidak jujur terhadap rakyat, niscaya dia diharamkan Allah masuk surga*".

Selanjutnya dikisahkan dari Abu Dzar ra, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah anda tidak mengangkatku (untuk memegang suatu jabatan pemerintahan)." Sambil memegang bahu Abu Dzar ra, Rasulullah menjawab sebagai berikut : *Hai Abu Dzar, engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan padanya dengan baik.*

Aisyah ra, pernah mendengar Rasulullah berdoa sebagai berikut : *Wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu ia menyulitkan mereka maka persulit pulalah ia, dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku berusaha menolong umatku maka tolong pulalah ia.* (Syafiie, 2004 : 130-131).

Di dalam Al-Quran tentang penempatan pegawai dalam administrasi kepegawaian ini dituliskan dengan jelas sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan kamu jangan berkhianat pula dalam menunaikan amanahmu, padahal kamu orang yang mengetahui" (QS. Al-Anfal : 27).

Kepemimpinan terhadap umat adalah amanah Allah yang harus kita jalankan dengan penuh kejujuran dan arif bijaksana. Tetapi bila kita laksanakan, misalnya dalam menempatkan bawahan adalah sanak saudara yang sebenarnya tidak mampu, berarti kita telah mengkhianati amanah. Kecuali saudara atau family kita tersebut mampu, sebagaimana Musa as menunjuk Harun as sebagai wakil beliau.

Tentang penempatan seorang bawahan inipun disampaikan Nabi Muhammad saw yang tercatat dalam hadist sebagai berikut :

"Barang siapa yang bertugas mengatur urusan kaum muslimin, maka diangkatnya seseorang padahal ia masih melihat orang yang lebih mampu untuk kepentingan islam dari yang diangkatnya itu, maka dengan begitu sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya".

"Siapa-siapa yang menyerahkan suatu jabatan kepada seseorang dalam suatu jama'ah (organisasi) padahal ia melihat orang yang lebih berhak bagi jabatan itu dalam lingkungan jama'ah tersebut, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan khianat kepada rasul-Nya serta khianat kepada segenap orang". Serta hadist lainnya yaitu : *"Apabila suatu jabatan diisi oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya"*.

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa (4) ayat 58 juga bercerita tentang penempatan person yang tepat pada

tempat yang tepat (*the right man on the right place*), pendelegasian wewenang (*to delegate authority*) dan penyampain amanat kepada yang berhak. “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* (QS. An-Nisa : 58). (Syafi’ie, 2000 : 38-39 dan 103).

Al-Qur’an dan Al-Hadist serta Kisah Sahabat, Memberikan Gambaran tentang Penempatan Pegawai Pemerintahan yang Baik dan Benar Bertanggungjawab dan Amanah

Dalam konteks lain bisa menjadi acuan bahwasannya dalam menempatkan pegawai hendaklah orang yang bertanggungjawab atas amanah yang diberikan, hal ini tergambar pada nash Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 27-28 : “*Hai orang-orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.* (Al-Anfal : 27-28).

Para ulama berkata, “*Sesungguhnya pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah nash itu adalah berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab.* “Maka dari itu, walaupun seruan ini mempunyai sebab khusus berkaitan dengan dengan turunnya, namun Al-Qur’an Al-Karim tetap sesuai dengan semua zaman dan tempat, maka berbahagialah orang yang berpegang padanya, dan bersedihlah bagi orang yang mengabaikannya. Seruan ini mengajak kita untuk berpaling dari akhlak tercela

dan menuju kepada akhlak yang mulia, melarang kita melakukan khianat dan berpegang pada amanah. Wahai orang benar-benar beriman, kamu tidak diperbolehkan melakukan tindakan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan para musuh kebenaran sebagai pemimpin. Mengkhianati perjanjianmu tentang *jihad fi sabilillah*, janganlah mengkhianati amanah dan muamalat antara kamu dan saudara-saudara kamu, padahal kamu telah berkomitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. (Buhairi, 2005 : 14-15).

Riwayat lain juga memberikan pelajaran bagaimana seorang yang diberikan amanah harus bertanggungjawab, dikisahkan dari Umar bin Khathab. Umar merasa tidak mempunyai kekuatan ketika diamanahkan sebuah jabatan kecuali jika ada rahmat, pertolongan dan dukungan dari Allah. Berkenaan dengan besarnya tanggungjawab beliau berkata : “*Seandainya ada onta yang hilang di dekat sungai Eufrat, sungguh saya khawatir jangan-jangan keluarga khatab yang akan dimintai pertanggungjawaban*”. Sementara itu, kisah Umar bin Abdul Aziz mengkisahkan : Ketika tampuk kekhalifahan diserahkan kepada beliau setelah pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik (Khalifah sebelumnya). Namun, beliau meminta untuk ditunda. Beliau kemudian menaiki kudanya dan kembali ke rumah. Salah seorang pelayannya yang bernama Muzahim masuk ke rumah seraya berkata, “*Wahai Amirul Mukminin, kelihatannya ada yang penting ?*” Beliau menjawab, “*Perkara yang menimpaku saat inilah yang kuanggap sangat penting. Sesungguhnya, tidak ada satupun umat Muhammad di barat maupun di timur kecuali punya hak yang aku harus menunaikannya, meski ia*

tidak menuliskan atau memintanya kepadaku (untuk melaksanakannya)." (Al-Banna, 2012 : 302-303).

Pandai, Orang Kepercayaan dan Paham Situasi

Sejarah lainnya juga menceritakan, bagaimana Rasulullah memilih seorang utusan untuk menyampaikan Islam kepada Raja-Raja disekitaran Jazirah Arab. Alkisah utusan untuk Habsyah, Rasulullah mengutus anak pamannya bernama Ja'far bin Abi Thalib sebagai duta besar disertai seorang dari kaum muslimin. Sebagaimana diketahui, Ja'far merupakan pemimpin Kaum Muslimin Hijrah ke Habsyah, beliau merupakan orang terpercaya lagi pandai, fasih berbahasa Habsyah dan orang terdekat Rasulullah, hal ini mengisyaratkan dalam memilih seseorang haruslah orang yang berkompeten dan mempunyai kapabilitas. (Asy-Syannawi, 2006 : 197-198).

Sebagaimana dikisahkan ketika zaman kekhalifahan Umar Bin Khatab, maka diangkatlah seorang yang bernama Amr Bin Ash sebagai Gubernur Mesir pada waktu itu, ia adalah seorang sahabat yang tangguh dan panglima perang. Amr Bin Ash adalah orang yang langsung tertarbiyah (terdidik) dari tangan Rasulullah SAW, ia mendapatkan pengajaran Al-quran dan Assunah langsung dari hamba yang mulia. Sebelumnya, pada masa Rasulullah beliau pernah menjadi Gubernur di Oman. Beliaulah yang bergelar pembebas Mesir dari cengkaman Romawi. Amr Bin Ash adalah orang yang amanat, yang menyebabkan Umar Bin Khatab ra seorang yang terkenal amat teliti memilih menetapkan Amr Bin Ash sebagai gubernur Palestina dan Yordania, kemudian di Mesir selama hayatnya Amirul Mu'minin ini. Amirul mu'minin Umar Radhiyallahu Anhu mengenal bakat dan kelebihan Amr Bin Ash ini sebaik-baiknya, serta menghitungkannya dengan sepatutnya. Oleh sebab itu sewaktu ia

dikirimkan ke Syria sebelum pergi ke Mesir, sahabat mengatakan kepada Umar Radhiyallahu Anhu bahwa tentara Romawi dipimpin oleh Arthabon, maksudnya panglima yang lihai dan gagah berani. Jawaban Umar Radhiyallahu Anhu ialah : *"Kita hadapkan Arthabon Romawi kepada Arthabon Arab"*. (Bastoni, 2002 : 189-190).

Melarang Nepotisme

Sebuah riwayat menegaskan bahwasannya dalam pengangkatan seorang pegawai dalam pemerintahan melarang perbuatan nepotisme, Al-Hadist : *"Barangsiapa yang mengurus salah satu urusan kaum Muslim (sebagai penguasa) dan mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan, maka baginya laknat dari Allah. Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan tidak akan menerima amal perbuatan nafilahnya, hingga ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang memberikan kepada seseorang batasan Allah, lalu ia merusak pagar (batasan) Allah tanpa haq. Maka atasnya laknat Allah. Atau dikatakan (oleh perawi hadist), atasnya terlepas jaminan (perlindungan) Allah ta'ala"* (Musnad Ahmad Nomor 21).

Hadist lain : *"Tidaklah seorang wali yang disertai urusan kaum Muslim, kemudian dia mati sedangkan dia besikap curang kepada mereka, melainkan Allah mengharamkan baginya surga."* (HR. Bukhari no 66618).

Kedua hadist tersebut menjelaskan, larangan yang tegas terhadap sikap nepotisme atau pilih kasih dalam pengangkatan pejabat pemerintahan ditunjukkan hadist tersebut dengan ungkapan bahwa perbuatan seperti itu berujung pada laknat Allah Swt dan menyebabkan seseorang masuk neraka. Memberikan jabatan kepada seseorang yang kurang kompeten hanya karena alasan suka atau ada hubungan keluarga

merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada umat, karena hal itu berarti umat diurus bukan oleh orang yang terbaik diantara mereka. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan sebuah pengkhianatan kepada agama ini, karena melanggar larangan Allah Swt dan Rasul-Nya.

Ada riwayat lain dari Umar ra yang menyatakan bahwa penguasa yang berbuat demikian sama saja dengan mengkhianati Allah Swt, Rasulullah saw dan seluruh kaum Mukmin. Dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dinyatakan bahwa penguasa yang mati, sedangkan dia berbuat curang atau berkhianat kepada umatnya, maka dia tidak dizinkan Allah Swt untuk masuk surga. Oleh karena itu, telah nyata bahwa berbuat curang adalah salah satu dosa besar, khususnya bagi mereka yang mendapatkan amanah untuk mengelola urusan umat dan mengangkat seseorang dalam urusan pemerintahan, semata-mata atas dasar rasa suka atau kedekatan keluarga, merupakan salah satu bentuk kecurangan atau pengkhianatan tersebut. (Fathullah, 2010 : 37-39).

Berilmu dan Bertubuh Sehat (*Fil'Ilmi Wal Jismi*)

Memilih pemimpin ataupun memilih orang yang hendak diangkat pada suatu jabatan tertentu untuk pengurusan umat, juga telah diajarkan oleh Allah Swt dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 247 menjelaskan : *“Dan berkatalah kepada mereka nabi mereka itu, “Sesungguhnya Allah telah melantik untuk kamu Thalut menjadi raja.” Mereka berkata, “Adakah patut dia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya. Sedang dia tidak diberi kemampuan dan harta.” Berkata dia, “Sesungguhnya, Allah telah memilih dia atas kamu dan telah melebihkannya keluasan daripada pengetahuan dan tubuh.” Dan Allah memberikan kerajaan-*

Nya kepada barangsiapa yang Dia kehendaki. Dan, Allah adalah Mahaluas, lagi Mengetahui. (Al-Baqarah, Ayat 247).

Memilih pemimpin, dalam Tafsir Al-Azhar karangan Prof. Dr. Buya Hamka, menjelaskan : *“Dan Berkatalah kepada mereka nabi mereka itu” (pangkal ayat 247).* Yaitu, Nabi Samuel, *“Sesungguhnya, Allah telah melantik untuk kamu Thalut menjadi raja.”* Di dalam kitab Perjanjian Lama disebut namanya Syaul, tetapi kita kaum muslimin niscaya mengikut yang diwahyukan Al-Qura'an yaitu Thalut. Permohonan Bani Israil meminta untuk mereka dilantik seorang raja itu rupanya dikabulkan Tuhan. Samuel diberi wahyu bahwa raja itu ialah Thalut dan beliau sampaikan kepada mereka. Akan tetapi, apa yang disangka sejak semula oleh Nabi Samuel memang bertemu. Setelah dimaklumkan kepada mereka yang akan menjadi raja mereka ialah Thalut, dengan serta merta mereka membantah, *“Mereka berkata, ‘Adakah patut dia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kemampuan dan harta.’”* Di sini tampak lagi penyakit yang menyebabkan mereka dapat ditindas oleh bangsa Palestina, semua pemuka merasa berhak, baik karena keturunan maupun karena kekayaan. Seorang Nabi Samuel memilih Thalut menjadi raja mereka. Mereka kenal dia, dia bukan asal raja-raja dan bukan orang kaya, bagaimana kami tunduk kepadanya. Kalau hanya itu yang akan dijadikan raja, kamilah yang lebih berhak. Mereka katakan *kami*, padahal yang akan menjadi raja hanya seorang. Di antara yang berkami itu kalau diangkat seorang, yang lain menyengkilang dan membangkang pula kelak. Mendengar bantahan mereka yang demikian, Samuel pun menjawab *“Sesungguhnya, Allah telah memilih dia atas kamu”*. Jadi, pemilihan Thalut menjadi raja bukanlah

karena kehendak Samuel, melainkan kehendak Allah. Sebabnya dia yang dipilih Tuhan ialah karena ada kelebihanannya dalam hal yang lebih penting daripada keturunan dan kekayaan, *“Dan telah melebihkannya keluasan dari pada pengetahuan dan tubuh”*. Seorang pemimpin revolusi, memerdekakan kaumnya dari tindasan musuh, tidak perlu seorang berketurunan raja sebab banyak diantara kamu yang keturunan orang-orang mulia di zaman dahulu dan banyak di antara kamu yang mampu banyak harta, tetapi kamu tidak mempunyai ilmu dan kemaun untuk berjuang, berperang dan memerintah. Tambahan lagi, tidak mempunyai tubuh yang sehat dan tampan, sebagaimana layaknya seorang raja atau pemimpin. Pada Thalut inilah kelebihanannya, dia berilmu dan mempunyai tubuh yang layak buat jadi raja. Tambahan lagi, *“Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada barang siapa yang dikehendaki”*. Artinya, kalau Tuhan kan mengangkat ke puncak kekuasaan, meskipun dia bukan asal raja ataupun orang kaya, dengan sendirinya dia akan naik, tidak dapat dihalangi oleh siapa jua pun, sejarah menunjukkan yang demikian. Bahkan tiap-tiap raja yang mendirikan kerajaan yang mula-mula bukan jualah mereka asal raja. Anak keturunan merekalah baru yang dinamai raja. *“Dan Allahlah Mahaluas, lagi Mengetahui”*. Tuhan Mahaluas, bukan hanya memandang yang ada di hadapan, sebagaimana pandangan kamu. Bukan memandang Thalut yang sekarang, sebelum dia resmi menjadi pemimpin kamu, tetapi Thalut masa depan dalam kekuasaannya memimpin kamu berperang. Dan, Tuhan lebih mengetahui akan kesanggupannya dari pada kamu.

Di sini Al-Qur'an telah meninggalkan dua pokok dasar buat memilih orang yang akan menjadi pemimpin atau pemegang puncak

kekuasaan. Pertama ilmu, kedua tubuh, terutama ilmu berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapinya, sehingga dia tidak ragu-ragu menjalankan pimpinan. Yang terpenting sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga. Pemimpin tertinggi itu tidak perlu tahu segala cabang ilmu, tetapi wajib tahu memilih tenaga yang akan ditugaskan menghadapi suatu pekerjaan. Itulah ilmu pimpinan. Disinilah maka Sayyidina Umar bin Khathab memerintah pernah mengakui terus terang bahwa Abu Bakar lebih pintar dari dia memilih tenaga. Abu Bakar telah memilih Khalid bin Walid menjadi kepala perang, padahal Umar kurang setuju sebab ada beberapa tabiat Khalid yang tidak disukainya, sehingga setelah Abu Bakar wafat dan dia naik menggantikan jadi Khalifah, perintahnya yang mula-mula sekali ialah menurunkan Khalid dari jabatannya. Khalid menyerahkan jabatannya dengan patuh kepada Abu Ubaidah, penggantinya. Bertahun-tahun kemudian setelah Khalid bin Walid meninggal, mengakulah Umar denga terus terang bahwa Abu Bakar lebih berilmu daripadanya, meletakkan orang pada tempatnya, *“the right man, in the right place”*, menempatkan orang yang benar, ditempat yang benar. Cacat Khalid pada pandangan Umar ialah karena agamanya yang kurang begitu dalam, sebagaimana Abu Ubaidah, meskipun cacatnya dalam beragama itu tidak juga ada. Adapun Abu Bakar melihat bahwa Khalid itu dalam memimpin peperangan jarang taranya. Abu Ubaidah meskipun alim, tidaklah sepintar Khalid dalam ilmu perang. Sehingga disaat itu, Khalid tetap membantunya dari belakang walaupun dia hanya telah menjadi seorang serdadu biasa. Itulah maksud ilmu. Hal ini pernah diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya *a-Siasah asy-Syar'iyah*. Yang dimaksud dengan tubuh ialah kesehatan, bentuk tampan, yang

menimbulkan simpati. Oleh sebab itu, ulama-ulama fiqih banyak berpendapat bahwa seseorang yang badannya cacat (invalid) jangan dijadikan raja kecuali cacat yang didapatnya di dalam peperangan, karena bertempur, di dalam melakukan tugas. (Hamka, 2015 : 483-484).

KESIMPULAN

Pegawai adalah unsur penting dalam pemerintahan, ini berkaitan dengan penyelesaian segala bentuk tugas serta pendistribusian kewenangan agar dapat dilaksanakan secara maksimal serta capaian organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentunya peranan ini harus diampu oleh pegawai yang merupakan ujung tombak. Islam banyak memberikan panutan tentang tata cara bagaimana penempatan pegawai pemerintahan yang seyogyanya, islam tidak luput memberikan perhatian tentang ini. Karena, islam menginginkan kejayaan dari orang-orang pilihan dan sesuai dengan syariat Al-Qura'an dan Al-Hadist serta salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bernilai moral tinggi untuk mencapai pemerintahan dan Negara yang bersih dan baik (*good and clean governance*). *Wallah a'alam bi la-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna Hasan (*terj*), 2012, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1*, Surakarta, PT. Era Adicitra Intermedia.
- Asy-Syannawi Fahmi (*terj*), 2006, *Fiqih Politik Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Bastoni Hepi Andi, 2002, *101 Sahabat Nabi*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Buhairi Syaikh M. Abdul Athi (*terj*), 2005, *Bagian 2 Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Fathullah Abu Lukman (*terj*), 2010, *60 Hadist Sulthaniya Hadist-Hadist tentang Penguasa*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.

Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi Juz 1, 2, 3 Bagian 1*, Jakarta, Gema Insani.

Pasolong Harbani, 2013, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, CV. Alfabeta.

Syai'ie Inu Kencana, 2004, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

_____, 2000, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Tjiptoherjanto Prijono dan Mandala Manurung, 2010, *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*, Jakarta, Universitas Indonesia UI Press.

Umam Khaerul, 2012, *Manajemen Organisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia.